

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, A., & Ukas. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gangguan Fungsi Jalan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Arman, Z. (2019). Analisis Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (O. Yanto (ed.); 1st ed.). Unpam Press.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49–58.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Hidayat, A. A. N. (2020). Ombudsman Temukan Maladministrasi Program Lama Tabungan Perumahan. *Tempo*.
- Idris, M. (2020). Polemik Tapera: Pensiunan PNS Tak Bisa Cairkan Duit Tabungan Perumahan. *Kompas.Com*.
- ILO-SCORE Indonesia. (2020). *Temuan-Temuan Utama Survei Usaha Terdampak COVID-19 dari program ILO-SCORE Indonesia*.
- Ishaq, H. (2016). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (1st ed.). Alfabeta.
- Ishaq, H. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Y. Ali (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Kawulusan, E. (2018). Tugas Dan Wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. *Lex Et Societatis*, 7(6), 128–137.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.)). AURA.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). LeutikaPrio.

- Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2019). Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan Penerapannya Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, Dan Ilmu Kesehatan*, 3(2), 321–332.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1).
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (N. M. Wiganda (ed.); 1st ed.). Hakim Publishing.
- Selly, & Ukas. (2021). Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Atas Sistem Pre Project Selling. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3).
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154–166.
- Sibuea, H. P., & Mandagi, A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2(1).
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. *Perspektif*, 26(2), 73–87.
- Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 72–83.
- Umar, K. P., Tambas, J. S., & Sendow, M. M. (2020). Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kelapa Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-SosioEkonomi*, 16(2).